

MANAJEMEN HUMAS PADA SEKOLAH INKLUSI

Dian Wahyu Pratama

Erny Roesminingsih

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

dian.17010714034@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sekolah inklusi di Indonesia saat ini masih jarang mendapatkan perhatian dan dukungan dari orangtua, masyarakat dan pemerintah. Problematika tersebut dapat dipecahkan dengan adanya manajemen humas yang baik. Manajemen humas pada sekolah inklusi dapat bersinergi untuk meningkatkan perhatian dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen humas pada sekolah inklusi. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi literatur, dengan tahapan menentukan topik, mencari informasi pendukung, menetapkan fokus topik, mencari bahan referensi, mengelompokkan bacaan sesuai sub topik, mereview dan memperbanyak bahan pendukung; mengelompokkan ulang bahan & hasil review, dan proses menulis. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah; 1) Sumber daya manusia yang ahli & berkompeten sebagai humas sekolah inklusi, 2) Sinergisme humas sekolah inklusi dengan orangtua & masyarakat, 3) Koordinasi humas sekolah inklusi dengan pemerintah secara berkala.

Kata kunci: Manajemen Humas, Sekolah Inklusi

Abstract

At present, inclusive schools in Indonesia still rarely receive attention and support from parents, the community and the government. These problems can be solved with good public relations management. Public relations management at inclusive schools can synergize to increase attention and support from related parties. This study aims to describe and analyze public relations management in inclusive schools. This study uses a literature study research design, with the stages of determining the topic, looking for supporting information, setting the focus of the topic, looking for reference materials, grouping readings according to sub-topics, reviewing and multiplying supporting materials; regrouping the review materials & results, and the writing process. The data analysis used in this research is content analysis with a qualitative descriptive model. The results of this study are; 1) Expert & competent human resources as public relations for inclusive schools, 2) Synergism of public relations for inclusive schools with parents & the community, 3) Coordination of public relations for inclusive schools with the government on a regular basis.

Keywords: Public Relations Management, Inclusive School

PENDAHULUAN

Bidang pendidikan menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Negara yang maju akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang baik. Hal tersebut dikarenakan pendidikan adalah salah satu sarana pengurai simpul permasalahan negara. Mengamati proses berjalannya pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah, baik bagi penyelenggara pendidikan, masyarakat maupun

pemerintah. Diperlukan adanya kerjasama semua komponen di Indonesia untuk bisa mengurai permasalahan permasalahan yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik yang dimiliki kebanyakan masyarakat Indonesia, yaitu dimana kualitas pendidikan yang baik ditentukan dari seberapa baik penyelenggara pendidikan yang ada. Memang konsep tersebut tidak sepenuhnya salah, namun baik orang tua, peserta didik dan pemerintah memiliki peran yang penting

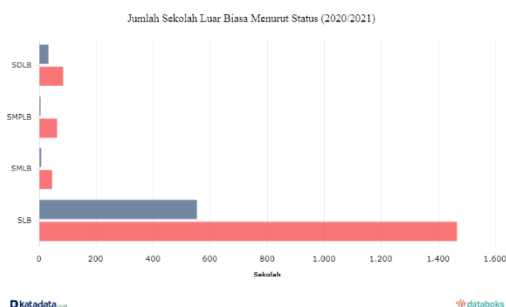
untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia (Megawati, 2012).

Selain itu pendidikan juga diartikan sebagai hak asasi yang paling mendasar dari individu manusia, tidak terkecuali juga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mialaret (dalam Anjaryati, 2011) mengatakan seluruh masyarakat di dunia tanpa memandang perbedaan suku, ras, sosial budayanya, serta agama. Bahwa setiap anak harus memiliki dan mendapatkan pendidikan yang layak. Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 juga sudah mengatur atas hak atas pendidikan bagi anak penyandang kelainan atau keturunan. Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut: "Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa." Pendidikan di Indonesia diselenggarakan berasas demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan peserta didik yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya deskriminasi.

Peraturan di atas menunjukkan layanan pendidikan formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dibedakan dengan peserta didik lainnya. Tindakan diskriminatif pada hak dan kesempatan peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh terjadi lagi. Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapat

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan masih kerap terjadi khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus, meskipun undang-undang telah secara tegas mengatur pemerataan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengakses pendidikan. Untuk mengatasi hal itu, solusi yang tepat program pendidikan inklusi. Taylor, W.R., & Ringlaben (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pendidikan inklusi menyebabkan tantangan baru pada penyelenggara pendidikan yaitu dalam hal ini sekolah, hal tersebut dikarenakan pihak manajemen sekolah harus menyiapkan beberapa program yang bersifat afirmatif terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Indonesia memiliki 2.250 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di berbagai jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.017 sekolah berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Rinciannya, 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 SLB berstatus swasta. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) tercatat sebanyak 115 unit yang terdiri dari 32 unit milik pemerintah dan 32 unit milik swasta. Kemudian, terdapat 67 Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) yang 62 unit di antaranya dimiliki swasta. Sementara, Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) yang menjadi jenjang tertinggi pendidikan anak berkebutuhan khusus berjumlah paling sedikit, yaitu 51 unit. Rinciannya, enam SMLB berstatus negeri, sedangkan 45 SMLB berstatus swasta.



Gambar 1: Data jumlah Sekolah Luar Biasa bersumber dari Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 2021

Sekolah inklusi di Indonesia dewasa ini mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi siswanya. Problematika yang paling sering ditemui pada satuan pendidikan inklusi adalah faktor komunikasi yang kurang baik antara pihak sekolah dengan pihak lain. Pihak lain dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu masyarakat awam dan orangtua siswa berkebutuhan khusus. Komunikasi dengan masyarakat awam terlihat kurang baik berdasarkan pada data yang menunjukkan bahwa masih terdapat miskonsepsi tentang konsep Pendidikan Inklusi yang disamakan dengan Anak Berkebutuhan Khusus secara keseluruhan (Yuliasut, 2019). Padahal, pendidikan inklusi tidak sesederhana stigma tersebut. Menurut Will (dalam Yuliasut, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah menyatukan pendidikan reguler dan pendidikan khusus, sehingga tidak ada label-label diagnostik dan kelas yang terpisah. Pendidikan Inklusi seyogyanya bukan khusus milik ABK, namun milik keberagaman siswa yang ada – baik yang normal maupun dengan kelebihan.

Sedangkan komunikasi yang kurang baik dengan orangtua siswa pendidikan inklusi adalah kurangnya pemahaman terhadap aktivitas dan program kerja yang disediakan sekolah. Pada satuan pendidikan

Inklusi, sekolah memiliki persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang berbeda dengan sekolah non pendidikan inklusi. Seringkali orangtua siswa kurang memahami dan bersikap pasif pada program kerja yang disediakan sekolah. Para orangtua merasa tidak perlu mengamati perkembangan anaknya selama proses pendidikan inklusi berlangsung. Hal tersebut membuat komunikasi berjalan satu arah tanpa adanya respon yang membangun dari orangtua.

(Tarnoto, 2016) melakukan penelitian tentang permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada tingkat SD di Yogyakarta. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah inklusi dikelompokkan menjadi 7 poin. Dua poin tersebut adalah peran orangtua dan masyarakat yang rendah terhadap keberadaan sekolah inklusi. Berikut permasalahan yang muncul dari masyarakat; minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi dan ABK (41,76%), pandangan negatif masyarakat terhadap ABK dan sekolah inklusi, kurangnya dukungan masyarakat terkait pelaksanaan sekolah inklusi (24,17%). Sedangkan permasalahan yang muncul dari orangtua adalah sebagai berikut; Kepedulian orangtua terhadap penanganan ABK kurang (94,27%), pemahaman orangtua tentang ABK kurang (41,21%), orangtua merasa malu sehingga menginginkan anaknya di sekolah umum (3,64%), toleransi dari orang tua siswa reguler terhadap ABK kurang (3,64%). Apabila ditelaah lebih dalam, permasalahan-permasalahan tersebut termasuk dalam masalah komunikasi antara sekolah inklusi dengan pihak luar sekolah.

Masalah komunikasi masyarakat dan orangtua pada sekolah inklusi di atas apabila dibiarkan berkepanjangan akan

berdampak pada penurunan kinerja sekolah inklusi. Pasalnya, komunikasi adalah faktor pendukung implementasi program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (Yuliasut, 2019). Agar upaya sekolah inklusi berhasil, komunikasi yang baik harus dijalin antara lingkungan intern dan ekstern sekolah. Apabila sekolah inklusi memiliki komunikasi yang dua arah yang baik dengan pihak luar, maka sekolah tersebut menjadi cepat berkembang. Namun, jika sebaliknya, komunikasi yang buruk akan membuat sekolah inklusi kesulitan mengembangkan program sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus. Penyelesaian pada masalah komunikasi sekolah inklusi dengan pihak luar harus segera ditemukan. Urgensi manajemen humas dalam pada sekolah inklusi dapat menjadi jawabannya. Komunikasi erat kaitannya dengan dunia kehumasan, sehingga solusi pada masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan manajemen humas pada sekolah inklusi.

Manajemen humas merupakan bagian turunan dari manajemen pendidikan. Pengertian Manajemen Humas menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relations (IPR) yang dikutip (Anggoro, 2000) adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Ruslan, (2021) menyebutkan bahwa manajemen humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, komunikasi serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Jadi manajemen humas merupakan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan guna terbentuknya

hubungan yang baik di dalam internal organisasi serta eksternal organisasi (masyarakat umum).

Manajemen humas pada sekolah inklusi berfokus sebagai perantara pimpinan dengan publik. Senada dengan pernyataan tersebut, Rakhman & Trihantoyo (2020) menjelaskan bahwa kegiatan humas harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum, harus mampu menciptakan, membina serta memelihara hubungan komunikasi ke dalam dan ke luar. Manajemen humas pada sekolah inklusi harus mampu menjelaskan tentang identitas sekolah, memaparkan program sekolah dan senantiasa membangun kerjasama dengan pihak lain yang mendukung perkembangan sekolah inklusi. Manajemen humas pada sekolah inklusi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah kurangnya komunikasi antara pihak dalam dan luar sekolah. Komunikasi yang ideal yaitu berjalan dua arah, antara pihak sekolah dengan pihak luar. Pihak luar dapat dikerucutkan menjadi masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Dengan adanya manajemen humas yang baik, kredibilitas dan eksistensi sekolah inklusi akan meningkat. Pasalnya, sekolah akan menjadi lebih terbuka dan mendapatkan citra yang baik dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan beberapa paparan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan sekolah inklusi bisa berjalan dengan baik jika sekolah mengimplementasikan manajemen pendidikan, khususnya dengan memprioritaskan manajemen humas didalamnya. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait topik tersebut dengan judul “Manajemen Humas Pada Sekolah Inklusi” yang dapat merumuskan tentang 1) Sumber daya manusia yang ahli & berkompoten sebagai

humas sekolah inklusi, 2) Sinergisme humas sekolah inklusi dengan orangtua & masyarakat. 3) Koordinasi humas sekolah inklusi dengan pemerintah secara berkala. Tujuan dari penelitian ini adalah mewujudkan guru, pemerhati pendidikan, orangtua dan publik dapat membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Manajemen humas menjadi solusi yang efektif dalam menyampaikan komunikasi antara pihak internal dan eksternal sekolah yang mengadaptasi pendidikan inklusi di dalamnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, pembaca, penyelenggara sekolah inklusi maupun peneliti selanjutnya dengan topik yang serupa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis yang diambil dari sumber referensi buku, atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial pada topik yang diteliti (Sugiyono, 2012). Data yang dikumpulkan melalui kajian teks yaitu 15 jurnal nasional, 10 jurnal internasional, 10 buku referensi, dan artikel dari internet.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi. Zed (2014) menjelaskan tahapan teknik analisis isi yaitu 1) memikirkan topik artikel yang akan dibuat; 2) mencari informasi yang mendukung topik; 3) menetapkan fokus topik yang akan dibahas; 4) mencari bahan referensi yang diperlukan; 5) mengelompokkan bacaan sesuai sub topik; 6) mereview dan memperbanyak bahan

pendukung; 7) mengelompokkan lagi bahan dan hasil review; 8) mulai menulis.

Pada studi literatur, penelusuran pustaka tidak hanya sebatas untuk menyiapkan kerangka penelitian namun secara bersamaan sekaligus memanfaatkan sumber pustaka untuk menemukan data penelitian (Zed, 2014). Sedangkan instrumen penelitian menurut Hamzah dalam studi literatur yaitu penggunaan analisis teks dan wacana (Hamzah, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil dari penulisan artikel ini merupakan pemaparan dari isi jurnal-jurnal yang diseleksi dan dipilih dengan menggunakan metode studi literatur. Selanjutnya, akan muncul temuan penelitian sehingga penulis dapat memberikan saran dan masukan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk judul yang dipilih penulis. Penulis memaparkan hasil telaah 25 artikel kemudian dikelompokkan menjadi 3 pokok pembahasan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia yang Ahli & Berkompeten sebagai Humas Sekolah Inklusi

Berdasarkan penelitian Kharisma & Agustina, (2019) menunjukkan bahwa website dan media sosial merupakan media digital yang digunakan dalam praktik humas digital. Namun, meskipun penggunaan media digital di humas pemerintah sudah merupakan hal yang umum, ternyata ada beberapa kendala yang masih dihadapi seperti belum adanya kebijakan yang mendukung dan kurangnya SDM yang memiliki kompetensi terkait. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Pada penelitian kualitatif yang diteliti oleh Widayanti, (2019) pada sekolah SD

Kanisius Eksperimental Mangunan, Sleman menunjukkan bahwa sekolah memiliki manajemen lingkungan belajar yang lengkap dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, penanaman nilai budaya dan pembentukan karakter. Selain itu SD Kanisius dapat menjadi acuan dan referensi bagi sekolah yang lain dalam mengembangkan daya eksploratif, kreatif dan integral peserta didik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2021) menjelaskan bahwa kompetensi guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan yang meliputi kegiatan pendataan anak berkebutuhan khusus, sosialisasi program dan penyediaan sumber daya. Tahap pelaksanaan program meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan layanan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus. Tahap terakhir ialah tahap monitoring dan evaluasi.

Menurut penelitian Falentin & Roesminingsih (2021) menjelaskan bahwa peran kepemimpinan dalam kepala sekolah sangatlah penting guna mengelola semua komponen sekolah, menggerakkan semua anggota untuk ikut bekerjasama mencapai tujuan sekolah, serta menjalin hubungan baik dengan seluruh warga sekolah serta masyarakat termasuk orang tua/wali siswa. Hal ini dilakukan selain untuk menciptakan hubungan yang harmonis di dalam maupun luar sekolah, juga untuk memudahkan kepala sekolah untuk menjalin kerja sama dengan mereka dalam upaya pencapaian tujuan sekolah.

Sebuah studi komparatif yang diteliti oleh Nurhanifah & Walisyah (2019) dengan judul *The Management of Public Relation of Islamic Higher Education in the Organizational Imaging (A Comparative*

Study of UIN of North Sumatra Medan and UIN of Syarif Hidayatullah Jakarta) menghasilkan beberapa fakta terkait urgensi Manajemen Humas dalam sebuah institusi pendidikan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu 1) dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten untuk melaksanakan tugas sebagai seorang humas, 2) dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik antara humas dan institusi terkait, dan 3) hubungan masyarakat dalam sebuah institusi dapat bekerja lebih optimal apabila memiliki independensi dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ashraf et al., (2018) dengan judul *Inclusive Education Management Evaluation Systems "IEMES" Model for Special Needs Institutes of Pakistan and China*. Hasil penelitian Anam dkk menunjukkan bahwa manajemen evaluasi memiliki peran penting dalam pendidikan inklusi. Ada beberapa perbedaan yang ditemukan dalam pengajaran pendidikan inklusi di Pakistan dan China, khususnya dalam bidang manajemen evaluasi yang merupakan ranah dari hubungan masyarakat. Penelitian ini mendapatkan informasi tentang contoh manajemen evaluasi dalam perspektif pendidikan inklusi di Pakistan yang sesuai dengan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Penelitian dengan judul *Management of Inclusive Education Classes in One of the Elementary School in Jambi Province* yang ditulis oleh Firman (2020) dari Universitas Jambi berisi tentang gambaran umum implementasi pembelajaran inklusi di SD Jambi. Pengambilan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian merujuk pada teori Miles and Huberman tentang tiga fase; 1) analisis persiapan, 2) pengumpulan data, dan 3) pasca

pengumpulan data. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen pendidikan inklusi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penataan tempat duduk dan sesi belajar khusus bagi setiap ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Selanjutnya, penelitian milik Robiyansah et al., (2020) dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul *The Development of Inclusive Education Management Model: Practical Guidelines for Learning in Inclusive School*. Tujuan penelitian ini adalah mengamati kondisi terkini, masalah dan kebutuhan dalam implementasi pendidikan inklusi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji model terbaik dari pendidikan inklusi sekaligus meneliti tingkat efektivitasnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hampir keseluruhan sekolah dengan praktik pendidikan inklusi memiliki tiga tahap, yaitu input, proses dan output. Kolaborasi dari tiga tahap tersebut seyogyanya dipertegas agar menghasilkan pendidikan inklusi yang optimal.

Jurnal berjudul *The Problem of Management and Impementation of Innovative Models of Work Interaction in Inclusive Education of Persons with Disabilities* adalah penelitian selanjutnya. Penelitian milik Stepanova et al., (2018) menghasilkan kesimpulan 3 hal, yaitu 1) mengembangkan kesempatan untuk latihan, 2) kemampuan mendidik, dan 3) pendidik yang berkompeten dalam psikis dan pendidikan siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Tiga hal tersebut dapat meningkatkan proses manajemen pendidikan menjadi lebih baik.

Penelitian milik Nikula et al., (2021) berjudul *Visions of An Inclusive School-Preffered Futures by Special Education Teacher Students*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 3 faktor

dalam upaya meningkatkan citra pendidikan inklusif, yaitu struktural, sosial, dan emosional. Terdapat juga faktor tambahan yang mencakup lebih dari satu sektor, yaitu melingkupi aspek pelayanan, komitmen, sarana sekolah yang baik dan peraturan yang dibuat. Penelitian tersebut menekankan pada sistem inklusi dengan meningkatkan pemahaman sebuah pada proses pendidikan inklusi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutisna et al., (2020) menjelaskan tentang penerapan program inklusi di SDN 1 Sangkawana Lombok Tengah. Menurut penelitian diatas menyatakan bahwa dalam aspek sarana dan prasarana sangat representatif untuk melaksanakan pendidikan, lalu dari aspek kurikulum sekolah telah menerapkan K13 guna menunjang pembelajaran, selanjutnya dari aspek tenaga pendidik memiliki pengelolaan kelas dan melayani siswa dengan bagus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Menurut Habib, Mustafa. Sihombing, Umi Masnah. Rahmadani, (2021) pada penelitiannya mengemukakan bahwa sebuah lembaga pendidikan islam bahkan hampir semua lembaga, membutuhkan adanya humas sebagai salah satu alat untuk mengembangkan diri. Pasalnya, kehadiran humas sangat penting dalam eksistensi sebuah lembaga. Dalam pelaksanaan tugasnya, sub bagian humas perlu mengemas pelaksanaan manajemen yang efektif agar mendapat. Cara yang dapat dilakukan yakni mempersiapkan program kerja humas sesuai dengan kebutuhan lembaga sehingga tepat guna dalam pengaplikasiannya.

Sinergisme Humas Sekolah Inklusi dengan Orangtua & Masyarakat

Menurut Basofi (2020) dalam judul penelitiannya tentang Manajemen Humas

Dalam Menarik Minat Masyarakat (Studi Kasus di IAIN Madura) ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Diantaranya perencanaan program manajemen humas, pelaksanaan program, evaluasi program, pola komunikasi yang dibangun kepada masyarakat, serta respon stakeholders terhadap program manajemen humas yang telah dijalankan. Aspek yang disebutkan diatas sangat penting dan harus diperhatikan untuk menggaet atensi dan minat masyarakat terhadap suatu lembag. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deddiliawan & Arafat, (2019) dalam usaha meningkatkan kredibilitas sekolah salah satunya dengan memperkenalkan sekolah pada masyarakat luas, yaitu publikasi sekolah kepada masyarakat luas. Dengan adanya pelatihan dan monitoring pembuatan website sekolah, menjadi salah satu wujud nyata untuk menyebarkan publikasi sekolah kepada masyarakat. Langkah tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas SMK Muhammadiyah 9 Wagir.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajri Dwiyama, Adriani, Ismia, (2020) kegiatan humas yang dilakukan oleh MAN 1 Bone sudah melalui tahap prosedur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kerja, dan evaluasi. Disini yang menjadi titik berat ialah pada poin evaluasi, karena sekolah selalu menggunakan evaluasi terhadap program humas yang sudah terlaksana sebagai sarana untuk memperbaiki strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran partisipasi aktif masyarakat. Selain itu sekolah juga selalu mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sekolah.

Menurut penelitian Priandono, (2019) mengemukakan bahwa hubungan masyarakat (Humas) dan sekolah dibidang pendidikan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi atau mitra kerja dalam rangka mensukseskan proses pendidikan dan pengajaran sehingga tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sinilah peran Humas sangat penting dalam upaya pencitraan sekolah.

Toharudin & Ghufroni (2019) melalui penelitian menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada sekolah inklusi bisa terlaksana dengan baik, salah satunya karena adanya sinergitas antara wali murid dan guru. Hal ini dapat mendorong untuk terciptanya pembelajaran sekolah yang efektif. Selain itu faktor lain seperti teknik komunikasi yang digunakan oleh guru dengan siswa yang berkebutuhan khusus dan melakukan pembelajaran yang inovatif. Merupakan faktor pendukung lain yang dapat menunjang pembelajaran inklusi untuk lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian dengan judul *The Function and The Role of Public Relation in The Milenial Education Center* yang ditulis oleh Hidayat, (2019) memberikan gambaran fungsi dan batasan secara gamblang dalam manajemen humas. Taufik mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah sebuah tahap awal untuk melahirkan institusi yang bertanggungjawab dan diminati publik. Indikator keberhasilan humas pada suatu institusi yaitu ketertarikan dan kepercayaan publik. Adapun fungsi manajemen humas adalah persiapan, pengoordinasian, partisipasi dan penasehat. Aktivitas utama dalam humas adalah riset persiapan, koordinasi, partisipatif dan mengevaluasi. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini yaitu humas merupakan hubungan timbal balik

antara masyarakat dan institusi serta dapat menimbulkan diskusi publik yang transparan.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul *Communication Technician: One of the Roles of Yehonala School Public Relations in Maintaining Image* milik Andy & Purwanti (2021) asal Universitas Putera Batam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi manajemen humas yang digunakan oleh sekolah Yehonala ada 3, yaitu 1) pengoptimalan Sosial Media, 2) konten Sosial Media, dan 3) respon yang dihasilkan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tugas utama dari manajemen humas di sekolah Yehonala adalah sebagai penghubung komunikasi antara sekolah dengan publik. Sistem manajemen humas yang dipilih pada sekolah tersebut adalah tertutup karena humas tidak ditugaskan untuk mencari informasi (sudah didelegasikan pada bidang lain).

Koordinasi Humas Sekolah Inklusi dengan Pemerintah secara Berkala

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi (2018) terkait manajemen humas dalam menarik minat masyarakat di SMKN 2 Ponorogo menjelaskan. Bahwa humas sekolah menggunakan strategi kolaborasi aktif yang melibatkan stakeholder sekolah. Selain itu sekolah juga menggunakan strategi lainnya yaitu a) *distingtif*, yaitu membangun reputasinya dengan sebaik mungkin. b) *fokus*, yaitu menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan tamatan profesional dan mandiri yang berwawasan iptek, berlandaskan imtaq, peduli dan berbudaya lingkungan. c) *reputasi*, d) *identitas*, yaitu sekolah pariwisata.

Berdasarkan penelitian Muspawi et al., (2019) program humas pada SMA 7 Merangin sudah disusun dan berjalan dengan baik. Akan tetapi strategi jitu

penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih belum optimal. Terkait dengan strategi manajemen humas menggunakan publikasi dengan baliho, sosialisasi dan menggunakan sosial media. Namun pada pelaksanaannya ada strategi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak terlaksana. Faktor penghambatnya yakni minimnya waktu, kurangnya sumber daya manusia dan transisi sekolah yang awalnya swasta menjadi negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shofa (2018), mahasiswa IAIN Surakarta dengan topik implementasi manajemen pendidikan inklusi. Peneliti menunjukkan praktik terbaik pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan Indonesia dapat ditemukan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal tersebut membutuhkan dukungan pemerintah dalam mengembangkan informasi terkait pendidikan inklusi. Harapannya, pemerintah dapat lebih giat mengadakan sosialisasi pendidikan inklusi semua layanan pendidikan, menginisiasi adanya pelatihan dan studi banding agar meningkatkan kecakapan pendidik, dan sosialisasi yang digancarkan secara masif melalui media cetak, online, forum pelatihan khusus pendidikan inklusi, khususnya pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Poolkrajang & Prammanee, (2021) dari University of Technology Thanyaburi dengan judul *Guidelines for the Management of Guidance and Public Relations on Further Vocational Education for Apply to the Innovative Vocational Scholarship*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam pendampingan dan

hubungan masyarakat pada pendidikan vokasi adalah 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Anggaran Dana, 3) Aktivitas, 4) Kerja sama, dan 5) Administrasi.

2. Petunjuk pelaksanaan manajemen pendampingan dan hubungan masyarakat pada pendidikan vokasi yaitu menggunakan model STARBURST yang terdiri atas 6 elemen; 1) Dukungan dan partisipasi dalam bidang administratif, 2) Koordinasi dengan pihak lain tentang beasiswa, 3) menyelesaikan proses pendampingan dan hubungan masyarakat, 4) Menggunakan media dan saluran komunikasi yang beragam, 5) Menggunakan relasi institusi pendidikan, dan 6) kunjungan lapangan ke masyarakat dari pintu ke pintu.

Pada penelitian yang dilakukan Anjarsari et al., (2018) mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dengan menggunakan metode kuantitatif. Temuan dari penelitian ini adalah masih terdapat anak berkebutuhan khusus mendapat pendidikan formal karena jarak sekolah yang jauh. Oleh sebab itu, adanya sekolah inklusi di tiap kecamatan diperlukan. Agar ABK tetap dapat bersekolah. Selain jarak, kendala pada sekolah inklusi adalah dari sektor tenaga pendidik. Masih banyak tenaga pendidik yang kurang optimal menyelenggarakan pembelajaran dalam model kelas layanan pendidikan inklusi. Seperti tidak adanya modifikasi, omisi, substitusi dan duplikasi pada materi pembelajaran.

Telaah artikel terakhir diteliti oleh Arab & Tabari, (2021) dengan judul *Developing a Strategic Model of Public Relations Promotion with an Emphasis on Media Literacy System*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model promosi hubungan masyarakat dengan peningkatan literasi media antara manajer dan karyawan Perusahaan Mazandaran Gas memiliki 5

komponen, yaitu; 1) Promosi literasi media pada 3 aspek, yaitu makro, sedang dan mikro, 2) Menentukan faktor, 3) Faktor yang bertentangan, 4) Strategi, dan 5) Konsekuensi.

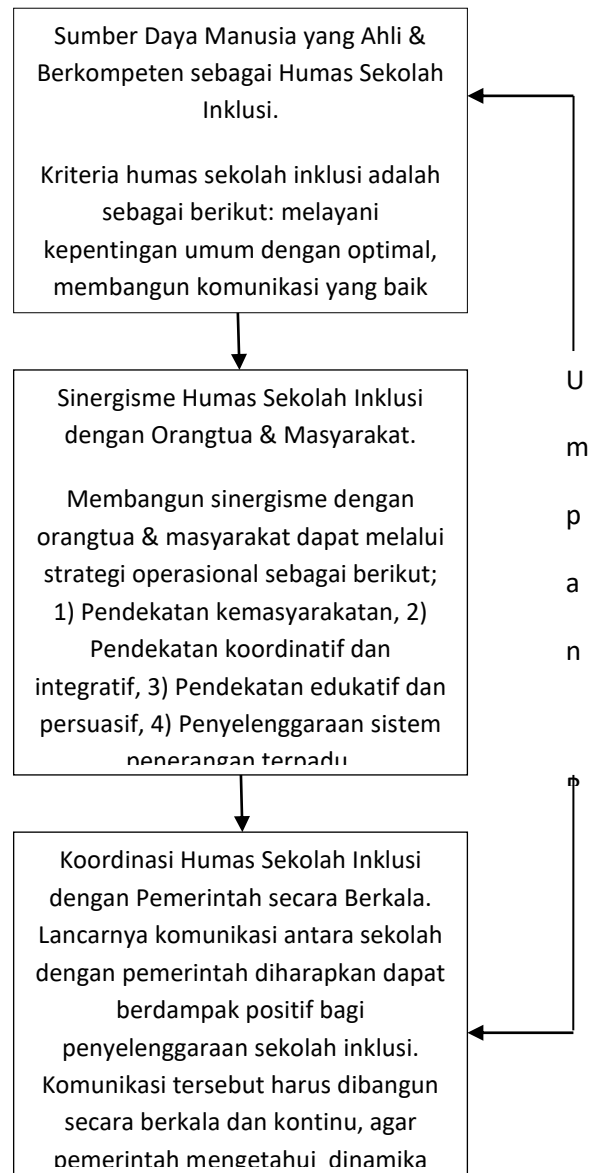
Kesimpulan dari hasil penelitian jurnal di atas adalah manajemen humas pada sekolah inklusi dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu: 1) Sumber daya manusia yang ahli & berkompeten sebagai humas sekolah inklusi, 2) Sinergisme humas sekolah inklusi dengan orangtua & masyarakat. 3) Koordinasi humas sekolah inklusi dengan pemerintah secara berkala. Poin pertama adalah sumber daya manusia yang ahli & berkompeten sebagai humas. Manajemen humas pada sekolah inklusi membutuhkan tenaga humas dengan kapabilitas tinggi. Pasalnya, humas pada sekolah inklusi menghadapi keberagaman karakter murid mulai dari murid normal hingga berkebutuhan khusus. Humas pada sekolah inklusi harus mampu menjalankan fungsi manajemen humas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan secara runtut dan terarah. Fungsi manajemen humas tersebut pada sekolah inklusi setara dengan pengelolaan dua jenis sekolah yaitu sekolah umum dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Kriteria humas sekolah inklusi adalah sebagai berikut: melayani kepentingan umum dengan optimal, membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat dan senantiasa menekankan budi pekerti luhur. Humas sekolah inklusi diharapkan mampu menjawab kebutuhan internal dan eksternal sekolah agar dapat menjadi lebih baik.

Poin kedua manajemen humas pada sekolah inklusi adalah sinergisme humas dengan orangtua & masyarakat. Keduanya berperan penting dalam mendukung eksistensi sekolah inklusi. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan melalui

sinergisme humas dengan orangtua & masyarakat. Kepercayaan masyarakat dan orangtua murid sekolah inklusi yang tinggi berdampak pada optimalisasi konsep manajemen yaitu, planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC). Pada fase planning, orangtua & masyarakat dapat memberikan aspirasi sebelum sekolah membuat kebijakan. Lalu masyarakat dapat turut serta dalam pembuatan konsep sekolah pada fase organizing. Kemudian pada fase actuating, masyarakat diharapkan berperan aktif mendukung berjalannya program sekolah inklusi. Fase terakhir dan paling penting adalah controlling, masyarakat dengan seksama mengawasi, memberi kritik dan saran membangun program sekolah inklusi.

Poin ketiga yaitu koordinasi humas sekolah inklusi dengan pemerintah secara berkala. Pemerintah memiliki peran utama dalam keberlangsungan dan keberlanjutan sekolah inklusi di Indonesia. Perjalanan panjang pendidikan inklusi di Indonesia masih membutuhkan perbaikan pada berbagai sektor. Inisiator utama dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan inklusi adalah pemerintah. Koordinasi humas yang baik dengan pemerintah akan membuka diskusi berlanjut tentang kondisi sekolah inklusi dewasa ini. Koordinasi tersebut diharap mampu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder pendidikan agar dapat menampung aspirasi dan kebutuhan sekolah inklusi di Indonesia. Selain koordinasi dan hubungan kerjasama yang baik, manajemen humas sekolah inklusi juga harus mampu menganalisis keadaan pendidikan inklusi di Indonesia beserta beberapa usulan solusi yang ditawarkan dari musyawarah praktisi pendidikan.

Penulis merangkai hasil temuan tersebut menjadi bagan sebagai berikut:



1.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan studi literatur, maka peran manajemen humas tidak bisa dipandangan sebelah mata. Berikut adalah kebaruan argumen penulis dengan didukung literatur yang sudah tertera tentang manajemen humas dalam pendidikan inklusi:

Sumber Daya Manusia yang Ahli & Berkompeten sebagai Humas Sekolah Inklusi

Manajemen humas pada sekolah inklusi diawali dengan pembentukan anggota

bagian hubungan masyarakat dengan spesifikasi yang ideal. Pemilihan dan pembentukan humas dengan memperhatikan sumber daya manusia yang baik dilakukan karena manajemen humas mengemban tugas penting pada suatu institusi. Terlebih pada sekolah inklusi yang menaungi beragam murid dengan karakter yang unik. Manajemen humas pada sekolah inklusi membutuhkan SDM yang ahli dan berkompeten untuk menjalankan konsep manajemen menurut George Tery yaitu, *planning, organizing, actuating & controlling* (POAC).

SDM yang ahli & berkompeten bagi humas sekolah inklusi membantu mengoptimalkan sekolah dalam membuat program kerja humas. Gassing & Suryanto (2016) menyebutkan ada lima elemen dalam pembuatan program kerja humas, yaitu 1) pengumpulan data, data dapat berasal dari berbagai sumber seperti catatan sejarah, informasi lisan, media sosial dan sebagainya. 2) analisis, analisis dilakukan setelah data terkumpul dengan membuat pertimbangan kekuatan dan kelemahan data. 3) strategi dan penentuan media, elemen ini termasuk dalam identifikasi sasaran publik. 4) pelaksanaan, setelah poin 1-3 dilaksanakan dengan baik langkah selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja humas. 5) evaluasi, evaluasi dilakukan setiap menyelesaikan setiap elemen program kerja, sehingga buka di akhir program kerja keseluruhan.

Keterampilan yang harus dimiliki humas sekolah inklusi agar dapat disebut ahli & berkompeten menurut Basofi (2020) adalah kemampuan memimpin, mengorganisir, mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada guru, tenaga-tenaga kependidikan, serta siswa dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Keterampilan tersebut berorientasi pada

kegiatan internal sekolah inklusi. Humas sekolah inklusi yang memiliki keterampilan di atas harus diimbangi dengan sikap pada eksternal sekolah. Adapun keterampilan untuk membangun hubungan masyarakat dengan eksternal sekolah menurut Iriantara (2013) yaitu mampu mengabdikan pada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik dan menekankan moral serta perilaku yang baik.

Humas sekolah inklusi harus siaga dan cakap dalam pelaksanaan setiap program kerja humas. Priandono (2019) membagi kegiatan humas dalam pelaksanaan program kerja sekolah dengan pendidikan inklusi menjadi 2, yaitu kegiatan internal dan kegiatan eksternal.

Kegiatan internal memiliki sasaran semua warga yang berada dalam lingkup sekolah dengan pendidikan inklusi. Pihak yang termasuk dalam warga sekolah ialah tenaga pendidik, pegawai tata usaha (TU) dan para siswa. Implementasi kegiatan internal humas pada sekolah inklusi antara lain sebagai mediator pihak sekolah dengan wali murid, garda terdepan dalam menyampaikan program kerja sekolah kepada orangtua siswa, sebagai penerima kritik dan saran yang bersifat membangun bagi sekolah dan lain sebagainya. Implementasi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah inklusi pada masing-masing wilayah.

Agar perumusan kegiatan internal humas ini tidak salah sasaran, maka humas sekolah inklusi harus tetap memperhatikan 3 prinsip Priandono (2019) sebagai berikut:

1. Mampu memberi penjelasan lengkap terkait kebijakan, penyelenggaraan program kerja dan perkembangan sekolah.
2. Mampu menampung kritik, saran dan pendapat warga sekolah agar sekolah menjadi lebih baik.

3. Mampu menjaga hubungan dan relasi harmonis antar warga sekolah agar tercipta kerjasama yang suportif.

Kegiatan eksternal manajemen humas ditujukan kepada masyarakat selain warga sekolah. Tujuan utama dari kegiatan eksternal ini adalah memperkenalkan kepada pihak luar sekolah tentang keunggulan sekolah inklusi dalam dunia dunia modern saat ini. Jenis kegiatan eksternal manajemen humas pada sekolah inklusi dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan tatap muka dan tatap maya (Priandono, 2019). Kegiatan eksternal tatap muka dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat bersama wali murid, konsultasi dengan masyarakat sekitar sekolah, sosialisasi kegiatan bersama masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kegiatan eksternal tatap muka dapat menjaga hubungan baik sekolah inklusi dengan pihak lain yang dapat membantu kemajuan sekolah.

Sedangkan contoh kegiatan eksternal tatap maya ialah semua aktivitas yang dilaksanakan dengan perantara media. Luqman (2013) menyebutkan contoh media tatap maya seperti televisi, radio, media cetak, majalah dan media lain yang dapat menginformasikan publik tentang kebijakan dan aktivitas sekolah inklusi. Dewasa ini, media digital menjadi salah satu hal yang dekat dengan masyarakat luas. Manajemen humas pada sekolah inklusi harus melihat hal tersebut sebagai kesempatan branding image dengan media digital, seperti sosial media, website, blog dan sejenisnya. Tujuannya adalah mempertahankan eksistensi sekaligus menyebarkan informasi tentang aktivitas sekolah inklusi kepada publik. Semakin banyak orang yang mengetahui dan memahami sekolah inklusi, maka akan banyak dukungan yang didapatkan dalam mengembangkan pendidikan inklusi di Indonesia.

Sinergisme Humas Sekolah Inklusi dengan Orangtua & Masyarakat

Sinergisme humas sekolah inklusi dengan orangtua & masyarakat merupakan kegiatan utama dalam manajemen hubungan masyarakat. Dukungan dua pihak tersebut mampu mendukung kemajuan sekolah inklusi. Sayangnya, permasalahan yang sering terjadi pada sekolah inklusi adalah rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Pratiwi, 2015). Orangtua murid ABK enggan memasukkan anak ke sekolah inklusi karena khawatir mendapat penolakan dan diskriminasi. Orangtua murid normal lebih memilih sekolah umum karena malu di sekolah inklusi. Sedangkan masyarakat sekitar memiliki pengetahuan minim tentang sekolah inklusi dan sering memandang negatif ABK di sekolah inklusi.

Masalah di atas dapat dituntaskan dengan membangun sinergi antara humas dengan orangtua & masyarakat. Langkah menjalin sinergisme dapat dilakukan dengan keterbukaan pihak sekolah inklusi dengan orangtua & masyarakat. Widjaja (2010) menambahkan, dalam membangun sinergisme dengan orangtua & masyarakat dapat melalui strategi operasional sebagai berikut; 1) Pendekatan kemasyarakatan, 2) Pendekatan koordinatif dan integratif, 3) Pendekatan edukatif dan persuasif, 4) Penyelenggaraan sistem penerangan terpadu.

Pendekatan kemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme sosial kultural. Humas sekolah inklusi dapat melakukan pengamatan singkat tentang sosial kultural yang dipegang oleh masyarakat sekitar sekolah. Humas dapat berafiliasi dan bekerjasama dengan baik dalam mendukung kegiatan kemasyarakatan. Langkah tersebut dapat

digunakan dalam rangka peningkatan perhatian dan kepercayaan publik pada eksistensi sekolah inklusi. Humas sekolah kemudian dapat meminta feedback atau tanggapan dari masyarakat tentang program sekolah, kritik dan saran yang mendukung serta mengajak partisipasi aktif masyarakat pada kebutuhan sekolah inklusi.

Pendekatan koordinatif dan integratif, pendekatan ini dilakukan dengan optimalisasi pada koordinasi dan integrasi humas sekolah dengan lembaga kemasyarakatan agar tercapai program hubungan masyarakat (Basofi, 2020). Sekolah inklusi yang diwakili oleh humas dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti contoh menjadi koordinator kegiatan masyarakat. Agar masyarakat dapat memberi kepercayaan penuh pada sekolah, maka humas harus menunjukkan kapabilitas dan kemauan sekolah untuk turut mendukung kegiatan masyarakat. Langkah tersebut dapat meningkatkan perhatian publik pada sekolah inklusi dan diharapkan dapat bersukarela membantu sekolah inklusi menjadi lebih baik.

Pendekatan edukatif dan persuasif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan literasi pendidikan dan bersifat ajakan kepada masyarakat. Sekolah inklusi dapat menyelenggarakan kegiatan edukatif dengan sasaran peserta dari masyarakat sekitar. Humas sekolah dapat membantu proses publikasi kegiatan, mulai dari penyebaran informasi secara langsung, pendistribusian pamflet kegiatan, dan penerbitan hasil kegiatan di media cetak dan media sosial. Masyarakat juga diajak secara langsung pada kegiatan dengan cara menjadi panitia sukarelawan agar dapat memberi usulan. Hal yang perlu diingat dalam kegiatan tersebut adalah materi

yang edukatif dan persuasif untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem penerangan terpadu bertujuan untuk meningkatkan gerak langkah operasional humas dengan masyarakat sekitar demi tercapainya tujuan hubungan kemasyarakatan (Widjaja, 2010). Pendekatan ini dapat menjadi repetisi langkah operasional sehingga kerjasama humas dengan masyarakat sekitar menjadi optimal.

Koordinasi Humas Sekolah Inklusi dengan Pemerintah secara Berkala

Manajemen humas pada sekolah inklusi dapat dioptimalkan dengan membangun koordinasi dengan pemerintah secara rutin dan berkala. Pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah menjadi poros penting dalam dinamika sekolah inklusi di Indonesia. Konsep penyelenggaraan pendidikan inklusi pada sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah. Tarnoto, (2016) menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum memberikan sosialisasi pelaksanaan sekolah inklusi, kebijakan yang jelas tentang sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi dan regulasi terkait pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2001 dengan melakukan uji coba perintis sekolah inklusi di daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Indonesia meresmikan pendidikan inklusi pada tahun 2004. Masyarakat Indonesia menyambut dan mengapresiasi kebijakan tersebut sehingga implementasi sekolah inklusi tumbuh dan berkembang cepat di berbagai daerah. Tingginya antusiasme masyarakat tersebut berhasil membawa Indonesia menduduki ranking ke 58 dari 130 negara pada tahun 2007. Selang setahun kemudian, Indonesia tidak dapat mempertahankan peringkat tersebut dan jauh merosot pada

ranking ke 63 dan menurun lagi menjadi ranking ke 71 pada tahun 2009. Tarnoto, (2016) menyebutkan kemerosotan tersebut berasal dari berbagai faktor namun yang paling utama adalah minimnya komitmen dan dukungan pemerintah pada penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia.

Mengamati sejarah sekolah inklusi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Humas sekolah inklusi tidak boleh berdiam diri atau menunggu arahan dari pemerintah. Humas harus bersikap pro-aktif dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sekolah inklusi. Oleh karena itu, koordinasi antara humas sekolah inklusi dengan pemerintah menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan.

Pratiwi, (2015) menyebutkan bahwa lancarnya komunikasi antara sekolah dengan pemerintah diharapkan dapat berdampak positif bagi penyelenggaraan sekolah inklusi. Komunikasi tersebut harus dibangun secara berkala dan kontinu, agar pemerintah mengetahui dinamika sekolah inklusi di Indonesia. Humas sekolah inklusi bertugas menyalurkan aspirasi dan keluhan dari sekolah, guru, murid dan orangtua kepada pemerintah dengan lugas. Hal tersebut efektif dilakukan dalam kondisi saat ini, saat sekolah inklusi mulai memiliki keluhan dan permasalahan yang kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan manajemen humas pada sekolah inklusi adalah memilih SDM humas yang ahli & berkompeten, sinergi dengan orangtua & masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah secara berkala. Manajemen humas pada sekolah inklusi perlu dikuatkan dari faktor internal

dengan cara memilih SDM yang memiliki keterampilan dalam konsep manajemen yaitu *planning, organizing, action* dan *controlling* (POAC). Permasalahan faktor eksternal berasal dari orangtua, masyarakat dan pemerintah. Humas sekolah inklusi harus membangun sinergi dengan orangtua & masyarakat agar dapat berjalan beriringan. Selain itu, humas juga melakukan koordinasi dengan pemerintah secara berkala agar dapat meningkatkan komitmen pemerintah Indonesia yang ramah pendidikan inklusi.

SARAN

Manajemen humas seyogyanya mencakup lingkup internal dan eksternal sekolah. Faktor internal sekolah yang turut mempengaruhi manajemen humas adalah hubungan yang baik dengan guru dan tenaga pendidik. Humas sekolah inklusi turut berfungsi menampung aspirasi, keluhan, kritik dan saran tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam sekolah khususnya dari guru. Guru sebagai figur yang melaksanakan langsung kegiatan inklusi kepada murid, sehingga memiliki pengalaman dan penilaian khusus pada sistem sekolah inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, R. N. (2018). *Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Menarik Minat Masyarakat di SMK Negeri 2 Ponorogo*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Andy, & Purwanti, A. (2021). *Communication Technician : One of the Roles of Yehonala School Public Relations in Maintaining Image Teknisi Komunikasi Salah Satu Peran Public Relations Sekolah Yehonala Batam Dalam Mempertahankan Citra*.

- COMMENTATE: Journal of Communication Management, 2(2), 129–140.
- Anggoro, M. L. (2000). Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia. Bumi Aksara.
- Anjarsari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1((2)), Hal. 91-104.
- Anjaryati, F. (2011). Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Beyondcenters and Circle Times (Bcct) di PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta. Tesis Yogyakarta: UIN Kalijaga.
- Arab, H., & Tabari, M. (2021). *Journal of System Management*. 7(4), 113–135.
- Ashraf, A., Zhu, X., & Rauf, Q. (2018). Inclusive Education Management Evaluation System “ IEMES ” Model for Special Needs Institutes of Pakistan and China. 15–23.
- Basofi, I. (2020). Manajemen Humas dalam Menarik Minat Masyarakat (Studi Kasus di IAIN Madura). Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Deddiliawan, A., & Arafat, Y. (2019). Manajemen Humas untuk Meningkatkan Kredibilitas Sekolah. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1).
- Fajri Dwiayama, Adriani, Ismia, R. O. (2020). Manajemen Humas: Membangun Peran Masyarakat pada Lembaga Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 63–71.
- Falentin, E., & Roesminingsih, E. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Literasi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Firman. (2020). Management of Inclusive Education Classes in One of the Elementary School in Jambi Province. *DIJDBM Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 1(4), 485–491.
<https://doi.org/10.31933/DIJDBM>
- Habib, Mustafa. Sihombing, Umi Masnah. Rahmadani, U. W. (2021). Pentingnya Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan Islam. *Edu Society Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.*, V.
- Hadi, A. (2017). Perkembangan dan Konsep Dasar Manajemen Humas dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Historis. *At-Ta’lim Jurnal Pendidikan*, 2(2016), 96–107.
- Hamzah. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, T. (2019). The Function and The Role of Public Relation in The Milenial The Function and The Role of Public Relation in The Milenial Education Center. *Proceeding of 3 Rd International Conference on Empowering Moslem Society in the 4 . 0 Industry Era*, 3, 189–200.
- Kharisma, T., & Agustina, L. (2019). PENERAPAN MANAJEMEN HUMAS DIGITAL DALAM KOMUNIKASI PUBLIK DI INSTANSI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Diakom*, 2(1), 112–119.
- Luqman, Y. (2013). Peran dan Posisi Humas sebagai Fungsi Manajemen

- Perguruan Tinggi Negeri Semarang. . . Jurnal Interaksi, 2((1)), 5.
- Megawati, P. (2012). Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Formatif* 2, (3)227-234.
- Muspawi, M., Rindhi, & Gustriana. (2019). Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Pendekatan Manajemen Humas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19 (3) Hal.
- Nikula, E., Pihlaja, P., & Tapio, P. (2021). Visions of an inclusive school – Preferred futures by special education teacher students. *International Journal of Inclusive Education*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1956603>
- Nurhanifah, & Walisyah, T. (2019). The Management of Public Relation of Islamic Higher Education in The Organizational Imaging (A Comparative Study of North Sumatra Medan and UIN of Syarif Hidayatullah Jakarta). *International Journal on Language, Research Adn Education Studies*, 3(1), 166–175. <https://doi.org/10.30575/2017/IJLR ES-2019010413>
- Poolkrajang, A., & Prammanee, R. (2021). Guidelines for the Management of Guidance and Public Relations on Further Vocational Education for Apply to the Innovative Vocational Scholarship. 01(03), 66–73.
- Priandono, F. (2019). Manajemen Humas Pendidikan Dalam Upaya Pencitraan Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan. *At-Ta'lim*, 18(2), 391–410.
- Rakhman, M. L., & Trihantoyo, S. (2020). Meningkatkan Keterserapan Lulusan Program Keahlian Multimedia Di Smk Negeri 12 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume*, 08(03), 199–212.
- Robiyansah, I. E., Mudjito, & Murtadlo. (2020). The development of inclusive education management model: Practical guidelines for learning in inclusive school. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 14(1), 80–86. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v14i1.13505>
- Ruslan, R. (2021). *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasinya)*. Raja Grafindo.
- Sari, M. & A. (2020). Penelitian Kapustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6((1)), 41–43.
- Shofa, M. F. (2018). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di Paud Inklusi Saymara Kartasura. 1(1).
- Stepanova, G. A., Tashcheva, A. I., Stepanova, O. P., Menshikov, P. V., Kassymova, G. K., Arpentieva, M. R., & Tokar, O. V. (2018). The problem of management and implementation of innovative models of network interaction in inclusive education of persons with disabilities. 12.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Sutisna, D., Indraswati, D., Nursaptini, Novitasari, S., & Sobri, M. (2020). Penerapan Program Pendidikan Inklusi di SDN 1 Sangkawana

- Lombok Tengah. *Jurnal Progres Pendidikan*, 1(1), 115–128.
- Taylor, W.R., & Ringlaben, P. R. (2012). Impacting Pre-service Teacher's Multidimensional Attitudes Toward Inclusion. *Higher Education Studies*, 2 (3) 16-2.
- Toharudin, M., & Ghufroni. (2019). Manajemen pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif. *Seminar Nasional Edusaintek*, 327–335.
- Werdiningsih, W. (2020). Manajemen Humas dalam Meningkatkan Peran Komite Sekolah di PAUD Sabila Ponorogo. *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(Maret), 109–122.
- Widayanti, E. S. (2019). Manajemen Lingkungan Belajar dalam Mengembangkan Daya Eksploratif , Kreatif dan Integral Peserta Didik. *Jurnal Media Manajamene Pendidikan*, 2(1), 52–57.
- Widjaja. (2010). *Komunikasi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Bumi Aksara.
- Yuliasut, P. R. (2019). Kompetensi Guru dalam menerapkan nila-nilai pendidikan inklusif di Sekolah Inklusi Tingkat Satuan Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional “Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0,”* 1(September), 358–367.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kapustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.